

STRATEGI RRC DALAM DINAMIKA KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN

Ade Priangani
Jeremy Aldi Rezki Hattu
Dosen dan Mahasiswa Hubungan Internasional UNPAS

Abstract

South China Sea (SCS) dispute is a matter of seizure or claim of a territory by some countries is indeed a complicated problem. Conflicts involving China with some members of ASEAN have heated up. To improve relations with ASEAN, China through persuasive attitudes and actions. Due to liberalization strategy of China's political economy over SCS especially to ASEAN. The success of ASEAN over the last 50 years has made ASEAN a market share by the major powers that gave birth to a "rivalry". This research uses descriptive method and historical method, where the research is focused on the plan and action of liberalization of China's political economy to face the rivalry of the major countries correlation with the dynamics of SCS conflict. The results of this research are: ASEAN succeeded in maintaining peace of political security stability but difference of opinion related issue of sensitive SCS dispute become challenge entering the next 50 years. SCS is actually becoming OBOR's maritime silk line to Southeast Asia. Facing the rivalry of the big countries, China uses its economic card as a control over ASEAN. AIIB as China's bargaining opportunity to ASEAN. So China can easily get rid of western influence and win ASEAN diplomatically.

Keywords : *China's Strategy, South China Sea, Liberalization of Political Economy, Rivalry, Territorial Claims*

PENDAHULUAN

Laut China Selatan (LCS), terletak di wilayah yang berbatasan dengan China, Taiwan, dan sebagian negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Wilayah ini secara geografis memiliki arti strategis, baik ditinjau dari segi kepentingan jalur lalu lintas pelayaran, dari aspek politik, pertahanan dan keamanan, ataupun dari aspek ekonomi berupa kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dalam aspek kepentingan lalu lintas pelayaran, wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang sangat penting. Wilayah ini juga merupakan lokasi yang penting tempat transit dan wilayah operasional kapal serta pesawat militer untuk aspek politik, pertahanan

dan keamanan. Aspek sumber daya alam yang berupa wilayah landas kontinen, memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas. Beberapa kegiatan eksplorasi membuktikan besarnya kandungan minyak dan gas melalui pipa-pipa dan kabel bawah laut. Wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan juga banyak mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya (Wiranto, 2016:2)

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian Negara-negara di sekitar wilayah LCS, menjadikan kebutuhan akan energi dan stock pangan di Negara-negara tersebut semakin meningkat. Dilatarbelakangi adanya perbedaan kepentingan di wilayah ini, seperti kontrol strategis terhadap posisi penting jalur transportasi laut, wilayah penangkapan ikan, eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah serta gas alam, menyebabkan potensi konflik di wilayah LCS semakin meningkat dan melibatkan para pihak claimant states (Negara-negara pengklaim), yaitu Republik Rakyat China (RRT), Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.¹

Untuk mempatenkan Laut China Selatan sebagai teritorialnya, pada 2009 China mengajukan peta sembilan garis putus-putusnya kepada PBB. Pengajuan itu lantas ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, diikuti protes dari Filipina dan Indonesia. Ketegangan terus berlanjut dengan beberapa gesekan serius, seperti saling cegat oleh kapal angkatan laut masing-masing negara. Lalu pada 2013, Filipina membawa sengketa dengan China ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Beijing. Sengketa berlanjut pada 2014 ketika China menyatakan bahwa panel tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. Selain itu, China juga menyatakan bahwa Filipina dan China telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa hanya melalui negosiasi. Namun pada Oktober 2015, PCA di Den Haag mengatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas setidaknya tujuh dari 15 klaim yang

¹ Yusuf Effendi, *Membangun Kekuatan Armada TNI AL*, Jalasena No. 08/I, Desember 2011, hlm. 15.

diajukan oleh Filipina. Sidang atas klaim tersebut kemudian diadakan pada November lalu dengan tidak dihadiri oleh perwakilan dari China.²

Mahkama arbitrase kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016, bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut China Selatan serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan kondisi alam di daerah sengketa. Filipina, menyambut baik keputusan arbitrase itu sementara China menolaknya mentah-mentah.³

Konflik di Laut China Selatan telah melibatkan hingga negara-negara ekstra kawasan (*non-claimant states*), namun alasan yang mendasar adalah mewaspadaikan kebangkitan China, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan militer (Wiranto, 2016:64-65). Sengketa wilayah Laut China Selatan sulit diselesaikan sebab setiap negara yang terlibat mempunyai kepentingan sendiri dan menempuh pendekatan sendiri meskipun beberapa negara yang mengklaim masuk dalam wadah ASEAN. Empat negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara itu (Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina) memperebutkan wilayah di Kepulauan Spratly dan Paracel yang juga diklaim oleh China.⁴

Vietnam mendesak agar ASEAN mengambil sikap lebih tegas terhadap China terkait sikap dan aktivitas negara itu di Laut China Selatan. Vietnam juga mendesak ASEAN agar tata perilaku di LCS yang tengah disusun dan dinegosiasikan antara ASEAN dan China bersifat mengikat. Sifat mengikat itu selama ini ditolak China. Adapun tata perilaku dapat disepakati dalam ARF

² “Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut China Selatan”, diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-tiongkok-selatan>, pada tanggal 7 April 2017.

³ Ibid.

⁴ Rohmatin Bonasir, “ASEAN masih ‘terpecah’ soal sengketa Laut China Selatan”, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150427_asean_laut_china_selatan, pada tanggal 23 Agustus 2017.

setelah proses negosiasi panjang selama 15 tahun terakhir.⁵ Hal ini dikarenakan Vietnam lebih cenderung mendekat ke AS.⁶

Filipina yang tadinya mengajukan gugatannya ke Mahkamah Arbitrasi Internasional untuk menentang klaim China, kini mulai mendekat ke China. Setelah putusan yang memenangkan Filipina, Manila dibawah Duterte justru terkesan mengabaikannya. Filipina terkesan tak peduli dengan keputusan arbitrase internasional atas sengketa LCS. Selain Filipina, Kamboja, Thailand dan Malaysia memiliki kecenderungan yang sama, yakni bersikap lunak kepada China. Kritik oleh barat atas alih kepemimpinan di Thailand yang dinilai tak demokratis membuat negara itu cenderung membuka diri lebih lebar pada kehadiran China. Sikap tersebut berpotensi besar memperlemah posisi ASEAN dan cenderung mengabaikan idealisme sentralitas ASEAN.⁷

Selain itu, China merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dengan total perdagangan sebesar 346,4 miliar dollar AS atau setara dengan 15,2 persen dari nilai total perdagangan ASEAN pada 2015. Dari data Kementerian Perdagangan untuk sektor investasi pada 2015, tercatat ASEAN menerima investasi asing langsung sebesar 8,2 miliar dollar AS dari China. Hal tersebut menempatkan China sebagai investor terbesar ke-4 secara total investasi ASEAN.⁸

Teori yang relevan untuk mengkaji masalah ini adalah Politik Luar Negeri. Jack C. Plano dan Ray Olton dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional (1999:155) mengatakan bahwa Politik Luar Negeri adalah: “Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik Internasional lainnya yang dikendalikan untuk menapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.

⁵ “Vietnam Desak ASEAN Bersikap terhadap China”, Harian Kompas, Bandung 6 Agustus 2017.

⁶ “Malaysia Merapat ke China, AS Gandeng Vietnam”, diakses dari <http://www.dw.com/id/malaysia-merapat-ke-china-as-gandeng-vietnam/a-36209922>, pada tanggal 23 Agustus 2017.

⁷ “Sikap Independen ASEAN Diuji”, Harian Kompas, Bandung 8 Agustus 2017.

⁸ Aprilia Ika, “China adalah Mitra Dagang Terbesar bagi ASEAN”, diakses dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/08/134500326/china.adalah.mitra.dagang.terbesar.bagi.asean>, tanggal 30 Agustus 2017.

Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan aktor-aktor (negara) lain, begitu pula dengan China.

Untuk memenuhi ambisinya, pada bulan Mei 1958, Mao mengumumkan strategi pembangunannya yang baru. Strategi Mao kali ini adalah dengan lompatan besar ke depan atau *Great Leap Forward* atau dalam bahasa aslinya disebut *Da Yue Jin*.⁹ Lompatan besar ke depan merupakan sebuah program yang disusun oleh Partai Komunis China di RRT, yang berlangsung dari tahun 1958 hingga 1960 dengan tujuan untuk membangkitkan ekonomi China melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan tenaga kerja murah. Kemudian setelah kematian Mao, orang yang berkuasa di China adalah Deng Xiaoping. Karena kedekatannya dengan militer dalam jangka waktu yang lama, dialah satu-satunya orang dalam puncak hirarki kekuasaan yang mampu mendapatkan penghormatan dan dukungan dari sebagian besar pejabat. Beberapa kebijakan China oleh Deng Xiaoping¹⁰ diantaranya empat modernisasi (militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, industry) dan kebijakan Pintu Terbuka (*Kaifang Zhenze*).

Kebijakan-kebijakan tersebutlah yang mengawali liberalisasi ekonomi China. Bergabungnya China dengan WTO, APEC serta sebagai mitra ASEAN. Demi cita-citanya mencapai modernisasi kebijakan-kebijakan seperti *Open door policy*, *Good Neighbour Policy* dan “*Go Global*” strategy di implementasikan. Serta inisiatif jalur sutra baru (OBOR) oleh presiden Tiongkok, Xi Jinping pada tahun 2013, yang berusaha menarik ASEAN ke dalamnya.

Politik Luar Negeri hanya menganalisa apa yang ditetapkan suatu negara terhadap lingkungan ‘luarnya.’ Ia tidak ingin masuk lebih dalam lagi guna membahas apa saja reaksi lingkungan (atau negara) ‘luar’ terhadap suatu negara yang memberlakukan Politik Luar Negeri. Reaksi tersebut meliputi interaksi

⁹ “GERAKAN LOMPATAN BESAR KE DEPAN (GREAT LEAP FORWARD) (*DA YUE JIN*)”, diakses dari <http://www.porosilmu.com/2015/01/revolusi-Tiongkok-masa-mao-ze-dong.html>, tanggal 26 April 2017.

¹⁰ China di Masa Deng Xiaoping.pdf, di akses dari elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30326/6a371482101, tanggal 26 April 2017.

antar negara di luar, sebagai contoh, China menolak dan tidak akan mematuhi Keputusan Arbitrase yang menolak klaim historis China. Oleh negara-negara yang ada disekitar LCS, apakah mereka satu sama lain saling mendukung, netral, atau bahkan cenderung menentang China .

Masalah ‘reaksi’ yang dimunculkan oleh lingkungan luar ini dibahas di dalam disiplin Politik Internasional. KJ. Holsti mendefinisikan Politik Internasional sebagai: “...interaksi antara dua negara atau lebih ... (yang terdiri atas) pola tindakan suatu negara dan reaksi atau tanggapan negara lain terhadap tindakan tersebut...”

Jika Politik Luar Negeri hanya membahas bagaimana sebuah negara menanggapi serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan analisis kondisi internasional, maka politik internasional merupakan aksi-reaksi tindakan antar-negara. Bidang yang secara khusus membahas prinsip ‘aksi-reaksi’ ini adalah Politik Internasional.

Berbeda dengan Politik Luar Negeri, Politik Internasional menitikberatkan pada dinamika ‘tanggap-menanggapi’ antara dua atau lebih negara. Tentu saja, di dalam Politik Internasional juga dibahas masalah Politik Luar Negeri, tetapi sejauh Politik Luar Negeri tersebut berakibat pada kondisi aksi-reaksi antarnegara.

Karena tema diatas menyangkut juga masalah konflik, maka juga digunakan teori konflik. Dalam bukunya yang berjudul *The Twenty Years Crisis* (1939), E.H. Carr bercerita tentang konflik antar negara bahwa:

“Konflik antar Negara tidak bisa dihindarkan dalam sistem internasional tanpa otoritas yang berwenang yang mengatur hubungan di antara mereka. Setiap individu harus tunduk pada ketentuan hukum dalam negara. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Negara. Karena dalam sistem internasional tidak ada sistem peraturan yang dapat memaksakan ketundukan Negara. Tidak ada hukum internasional yang bisa membuat Negara mempertimbangkan tindakan-tindakannya. Negara dapat dengan bebas melakukan apa saja dengan kekuatan yang mereka miliki.”

Setiap konflik yang terjadi selalu dicari jalan penyelesaiannya. Terkadang, konflik dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh Negara atau oleh organisasi regional bahkan

organisasi internasional, seperti ARF (*ASEAN Regional Forum*), AMF (*ASEAN Maritime Forum*), dan sebagainya. Apabila dengan mekanisme penyelesaian konflik tersebut belum juga mendapatkan hasil, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan ke ranah yuridis melalui Mahkamah Arbitrase maupun Mahkamah Internasional (Wiranto, 2016:37).

Dalam kajian ini juga menggunakan teori strategi yang berasal dari istilah militer. Menurut pengertian klasik strategi adalah suatu manuver militer untuk mencapai pertempuran dan taktik digunakan saat kedua kekuatan saling bertemu. Clausewitz (1812:19) dalam *Principles of War* menyatakan bahwa strategi adalah *the combination of individual engagements to attain the goal of the campaign or war*. Menurut Clausewitz (1832) dalam *On War* menyatakan bahwa strategi adalah *the use of an engagement for the purpose of the war*. Untuk mencapai tujuan perang, maka diperlukan kekuatan/pasukan. Sehingga dapat disimpulkan dari pernyataan Clausewitz bahwa strategi adalah pemanfaatan pertempuran untuk mencapai tujuan perang dengan menggunakan kekuatan/pasukan yang ada.

Namun, sesuai perkembangan jaman strategi mengalami perluasan makna. Perluasan makna pada strategi yaitu pengembangan menuju ranah non militer. Karena masing-masing memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjadi penyebab perang. J.C. Wylie (2007:9), *Strategy is a plan of action designed in order to achieve some end; a purpose together with a system of measures for its accomplishment*.¹¹ Penjelasan Wylie menunjukkan bahwa perencanaan dari suatu aksi untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan sistem yang terukur untuk pencapaian keberhasilan disebut strategi.

Liddell Hart menyatakan bahwa strategi adalah seni mendistribusikan dan menggunakan metode atau cara-cara militer untuk memenuhi tujuan akhir kebijakan yang diambil. Keberhasilan dari strategi tergantung terutama kepada kalkulasi yang tepat serta koordinasi antara akhir dan metode yang digunakan (*end dan means*).

¹¹ Frans P.B. Osinga, Science, *Strategy and War : The Strategic Theory of John Boyd* (New York : Routledge, 2007) hlm. 9.

Adapun diplomasi sebagai instrument negara untuk melaksanakan Politik Luar Negrinya , adalah komunikasi formal yang dilakukan oleh suatu negara dengan pihak lain diluar negara . Hal ini dapat berupa negara lain, negara-negara lain, ataupun kumpulan berbagai negara yang tergabung dalam suatu organisasi. Diplomasi adalah pelaksanaan dari politik luar negeri suatu negara. Diplomasi haruslah dilakukan dengan mengikut sertakan kementerian luar negeri Negara yang bersangkutan, agar memperoleh otoritas sebagai bagian dari politik luar negeri. Namun hal ini tidak harus berarti bahwa aktivitas antar pihak dari dua Negara yang menyertakan kementerian luar negeri langsung menjadi bagian dari diplomasi. Tanpa agenda yang terkait dengan politik luar negeri sebagai strategi maka hal ini adalah sekedar aktivitas antar bagian dari dua Negara.¹²

Dalam kasus Laut China Selatan, strategi China atas kawasan Laut China Selatan merupakan jalur sutra maritime inisiatif *One Belt One Road* China. Terdapat upaya reklamasi China untuk mengontrol kawasan tersebut serta memperkuat kedudukannya. Lalu dengan mendirikan AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*) guna sebagai saluran dana untuk pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Selanjutnya dengan menggunakan diplomasi ekonominya terhadap ASEAN, sehingga China dengan mudah mengontrol alur negosiasi sesuai dengan kepentingannya.

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dalam kaitan-kaitannya dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu sejauh mana perkembangan Dinamika Konflik di Laut China Selatan dan bagaimana Strategi Politik Luar Negeri China merespond atas dinamika konflik yang terjadi.

¹² J.H, A.Irawan, dan Giandi Kartasmita. 2015. Penelitian Monodisipliner : “*Diplomasi komersial Indonesiake Belanda Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)*”. IPPM, UNPAR.

PEMBAHASAN

A. Solidaritas Anggota ASEAN dalam Mempertahankan Stabilitas di LCS

Terdapat perbedaan dan perubahan sikap antara anggota-anggota ASEAN. Vietnam mendesak agar ASEAN mengambil sikap lebih tegas terhadap China terkait sikap dan aktivitas negara itu di Laut China Selatan. Vietnam juga mendesak ASEAN agar tata perilaku di LCS yang tengah disusun dan dinegosiasikan antara ASEAN dan China bersifat mengikat. Sifat mengikat itu selama ini ditolak China. Jelas sekali bahwa Vietnam mengambil jarak dengan China. Sikap Vietnam tersebut bisa dikaitkan dengan upaya AS dalam mencari sekutu untuk menyaingi China.

Pada 2013, Filipina membawa sengketa dengan China ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Beijing. Keputusan arbitrase internasional yang saat itu telah menolak klaim China dan memenangkan Filipina. Namun Filipina yang tadinya mengajukan gugatannya ke Mahkamah Arbitrasi Internasional untuk menentang klaim China, kini mulai mendekat ke China. Setelah putusan yang memenangkan Filipina, Manila dibawah Duerte justru terkesan mengabaikannya. Filipina terkesan tak peduli dengan keputusan arbitrase internasional atas sengketa LCS. Selain Filipina, Kamboja, Thailand dan Malaysia memiliki kecenderungan yang sama, yakni bersikap lunak kepada China. Kritik oleh barat atas alih kepemimpinan di Thailand yang dinilai tak demokratis membuat negara itu cenderung membuka diri lebih lebar pada kehadiran China. Sikap tersebut berpotensi besar memperlemah posisi ASEAN dan cenderung mengabaikan idealisme sentralitas ASEAN.

ASEAN perlu menyadari bahwa dengan adanya perbedaan yang berlarut-larut akan memperlemah posisi ASEAN di dunia internasional. Perbedaan pendapat terkait China dalam sengketa LCS memperlihatkan bahwa pengaruh China begitu kuat dalam melanggengkan perbedaan di tubuh ASEAN.

Keputusan Kamboja, sebagai tuan rumah KTT Ke-20 ASEAN, untuk tidak memasukkan soal Laut China Selatan ke dalam agenda resmi KTT dilihat sebagai

hasil dari pengaruh dan tekanan China terhadap negara itu. Dengan kata lain, apabila ASEAN tidak dapat menyatukan sikap sesegera mungkin, spekulasi yang mengatakan bahwa China berkemampuan dan berkepentingan untuk menekan ASEAN akan mendapat pembenaran.¹³

Ketidak mampuan ASEAN dalam merumuskan COC dan hasil diskusi panjang yang nantinya mengikat atau tidaknya COC, dapat menimbulkan kritik bahwa ASEAN sebagai satu suara yang sama dan upaya integritas ASEAN, visi 2020 sebagai *ASEAN Community in a Global Community of Nations*, yang masih merupakan cita-cita yang jauh dari harapan.

B. Soliditas Anggota ASEAN dalam Mempertahankan Stabilitas ASEAN di LCS

Sikap independen ASEAN akan diuji, apakah ASEAN nantinya berhasil mengambil satu suara terkait mengikat atau tidaknya COC, dan berhasil mempertahankan netralitas dan keutuhan ASEAN dalam membela anggotanya tanpa terikat oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar.

Selain itu terdapat perubahan sikap Filipina terkait putusan Pengadilan Arbitrase Internasional berdampak pada soliditas ASEAN. Filipina tadinya mengajukan gugatannya ke Mahkamah Arbitrasi Internasional untuk menentang klaim China. Setelah putusan yang memenangkan Filipina, Manila Dibawah Duterte justru terkesan mengabaikannya. Filipina terkesan tak peduli dengan keputusan arbitrase internasional atas sengketa LCS. Presiden China, Xi Jinping, sebelumnya mengatakan kepada Filipina dan Vietnam bahwa sengketa Laut China Selatan (LCS) harus diselesaikan secara bilateral. Hal itu diungkapkan Jinping dalam pertemuan terpisah dengan pemimpin kedua negara di sela-sela pertemuan APEC di Lima, Peru tahun 2016. Selama pertemuan di Peru, Jinping mengatakan kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk secara aktif memikirkan kerja sama maritim dan meningkatkan interaksi positif di laut menjadikan LCS sebagai kesempatan untuk kerja sama bilateral. Filipina bersedia

¹³ Rizal Sukma, "ASEAN dan Sengketa Laut China Selatan", diakses dari internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.China.Selatan, tanggal 5 September 2017.

untuk benar-benar menangani masalah-masalah maritim dengan China melalui dialog dan konsultasi.¹⁴

Baik Filipina maupun Vietnam mengharapkan keputusan arbitrase internasional tersebut, yang menolak klaim china di jalur laut strategis yang menjadi jalur bagi niaga dunia senilai 5 triliun dollar AS per tahun. Kedua negara itu juga menyerukan agar penghormatan atas hukum laut internasional disebutkan dalam pernyataan bersama. Kamboja yang meminta dilakukannya pembicaraan bilateral menentang penyebutan keputusan hukum tersebut. Manila sepakat untuk menghilangkan rujukan kepada keputusan hukum itu dalam pernyataan bersama. Hal itu dilakukan Manila untuk mencegah agar kebuntuan itu tidak mengarah pada kegagalan mengeluarkan pernyataan bersama.¹⁵

Meski demikian, pernyataan bersama tersebut menyebutkan pentingnya menemukan resolusi damai dalam sengketa LCS sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang menjadi rujukan bagi keputusan mahkamah tersebut. Soliditas ASEAN pun akan diuji, terkait hal penggunaan landasan hukum internasional dalam perumusan COC atau tidak. Negara ASEAN harus satu suara dalam bertindak tegas atas sengketa LCS. Kenetralan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan memberikan arti bahwa ASEAN tetap membela anggotanya. Hal ini bertujuan agar menghindari konflik berkepanjangan antar sesama anggotanya dan menuju pada tujuan ASEAN dibentuk dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Konflik antar anggota tentunya akan menghambat pembangunan negara-negara ASEAN. Akan sangat disayangkan apabila ASEAN yang dibentuk untuk mensejahterahkan rakyatnya untuk menuju suatu integritas regional, malah menjadi arena “*Power Projection*” negara-negara besar.

¹⁴ Berlianto, “*Soal LCS, China Desak Penyelesaian Secara Bilateral*”, diakses dari international.sindonews.com/read/1156787/42/soal-lcs-china-desak-penyelesaian-secara-bilateral-1479622949

¹⁵ “*Filipina Cabut Isu Laut China Selatan, ASEAN Keluar dari Kebuntuan Bersama*”, diakses dari internasional.kompas.com/read/2016/07/25/15264661/filipina.cabut.isu.laut.china.selatan.asean.ke-luar.dari.kebuntuan.bersama, tanggal 6 September 2017.

C. Rencana serta Tindakan Persuasif China Atas Kawasan LCS

Komitmen China pada kerjasamanya dengan ASEAN serta gagasan rencana OBOR yang sedang berlangsung, ditandai dengan tindakan persuasif China yang berusaha menggandeng beberapa negara ASEAN. China berusaha untuk memelihara dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas keamanan. Karena kawasan LCS menjadi krusial bagi proyek OBOR serta jalur perdagangan China-ASEAN. Terjadinya perang terbuka atau ketidakstabilan keamanan di kawasan LCS akan berdampak pada kerjasama dan hubungan China-ASEAN. Usaha China selama beberapa tahun terakhir dalam memperluas pengaruhnya ke ASEAN akan sia-sia, dan China akan kehilangan mitra kerjasama yang penting. Dengan berbagai ketegangan yang timbul, akan kontradiksi terhadap kebijakan China terhadap ASEAN. China tentu tidak menginginkan perang dengan ASEAN. Selain itu, ASEAN bukan saja pangsa pasar China, negara-negara besar seperti AS, India, Jepang, Korea Selatan, dll, juga turut bersaing dalam memasarkan produk-produknya ke ASEAN. China harus bisa bersaing dengan beberapa negara besar tersebut. Dengan kedekatan geografisnya dengan kawasan Asia Tenggara, China perlu untuk menjadi kekuatan besar baru di kawasan. Hal itu didukung dengan perlunya penguasaan pasar oleh China di ASEAN. Konsistensi China juga dipertegas oleh pernyataannya bahwa ASEAN adalah mitra dalam derap diplomasinya dan mendukung komunitas ASEAN untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan stabilitas kerja sama keamanan kawasan oleh Sekjen Pusat ASEAN-China (ACC) Yang Xiuping pada pembukaan "ASEAN-China Day Fair", Selasa 18 Agustus 2016, serangkaian peringatan 25 tahun kemitraan dialog ASEAN dan Tiongkok. Karena begitu pentingnya ASEAN bagi China, Oleh karena itu, kedua pihak hendaknya saling memperkuat kerja sama untuk membangun hubungan dan kerja sama yang lebih baik, lebih menguntungkan kedua pihak di masa depan. Jika China tidak bias menjaga hubungan baiknya dengan Negara-negara ASEAN, tidak hanya akan kehilangan mitra dagang pentingnya, kebijakan OBOR juga akan terhambat, serta tujuan untuk menjadi kekuatan besar di Asia tengah dan IndoChina akan sangat sulit terwujud.

D. Liberalisasi Ekonomi-Politik China Menghadapi Rivalitas Negara Besar di Kawasan Asia Pasifik

Terdapat dua komponen utama dalam OBOR, yaitu transportasi darat dan laut. Transportasi darat disokong oleh Sabuk Jalur Sutra Ekonomi (Silk Road Economic Belt), sedangkan Jalur Sutra Maritim (MSR) berperan sebagai penyokong transportasi laut. LCS dalam proyek OBOR nantinya merupakan Jalur Sutra Maritim (dalam peta *21st Century Maritime Silk Road*) yang menghubungkan China dengan Asia Tenggara.



1) Kontrol China atas kawasan LCS

Sebelumnya di LCS China telah mereklamasi dan militerisasi beberapa pulau buatanya. Peran pulau buatan China di masa perang dan dalam hukum maritim tampaknya sangat diragukan. Terlalu kecil dan terisolasi untuk mempertahankan diri dari serangan besar, aset-aset ini dapat dengan mudah menjadi beban di masa perang. Oleh karena murni buatan manusia, pulau-pulau ini tidak berhak mendapatkan batas laut teritorial 12 mil laut atau zona ekonomi eksklusif 200 mil laut.

China mungkin tidak secara resmi mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di Laut China Selatan karena tindakan semacam itu dapat memicu krisis besar dan membuat banyak negara Asia Tenggara memusuhi

Tiongkok. Tapi Beijing akan memberlakukan beberapa zona pertahanan udara di daerah-daerah sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly. China juga secara diam-diam akan menyatakan bahwa langit dalam garis berbentuk huruf U menjadi miliknya.¹⁶

2) **China dan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)**

Untuk memenuhi inisiatif *One Belt One Road*, diperlukan sejumlah besar injeksi modal, maka AIIB terbentuk. AIIB dipandang sebagai strategi penting untuk mendukung pelaksanaan inisiatif ini. Alasan utama di balik pengaturannya AIIB adalah dengan memperluas pengembangan kemitraan di antara negara berkembang - untuk membangun mutual politik kepercayaan, integrasi ekonomi, dan mempertemukan masyarakat dengan kepentingan budaya.

Sekaligus membawa isu membangkitkan pembangunan negara-negara berkembang di kawasan yang dilalui jalur sutra dan jalur maritim. Sebenarnya ini dapat menjadi kendaraan politik bagi China pula untuk mengembangkan ide OBOR demi meraih kepentingannya di Laut China Selatan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa China sebagai penginisiasi AIIB mendapat kemenangan diplomatik dalam peluncuran konsep visi strategis jalur perdagangan dunia.¹⁷

3) **Diplomasi ekonomi-politik China di ASEAN**

a. **Diplomasi ekonomi China melalui sektor perdagangan.**

Kerjasama yang dilakukan China dengan ASEAN pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketakutan ASEAN akan kekuatan ekonomi China yang sangat besar. China melakukan kebijakan-kebijakan yang spesifik kepada ASEAN untuk membantu negara-negara ASEAN menyelesaikan masalah perdagangan dan investasi dan juga membantu ASEAN menjaga stabilitas finansialnya. Para pemimpin China berusaha membangun citra China yang dermawan melalui

¹⁶ Alexander L. Voving, "Strategi Laut China Selatan", diakses dari apdf-magazine.com/id/strategi-laut-china-selatan/, pada tanggal 16 September 2017.

¹⁷ Elisa Putri Ayuningtyas, "*KEPENTINGAN CHINA "ONE BELT, ONE ROAD" MELALUI AIIB (ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK)*", diakses dari www.researchgate.net/profile/Elisa_Ayuningtyas/publication/309556158_China_dan_AIIB_dalam_Perspektif_Neorealisme/links/5816ce3608aedc7d89676863/China-dan-AIIB-dalam-Perspektif-Neorealisme, tanggal 17 September 2017.

proposal kerjasama ekonominya. China juga berusaha meyakinkan bahwa pihaknya siap menawarkan kerjasama yang bersifat “menang menang” sehingga ASEAN lebih tenang dan percaya bahwa China yang kuat akan membantu mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.

Tren defisit perdagangan ASEAN terhadap China menyebabkan meningkatnya dependensi perdagangan ASEAN terhadap produk China. Semakin tergantung ASEAN kepada China maka akan semakin sulit juga bagi ASEAN untuk mempertahankan independensinya dan semakin besar pula kemungkinan China mengontrol atau menyetir kebijakan perdagangan ASEAN agar sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Pada kasus Indonesia contohnya neraca perdagangan Indonesia-China defisit di pihak Indonesia. Pada tahun 2008, perdagangan keduanya mencapai US\$31,5 milyar atau merepresentasikan pertumbuhan sebesar 25.7%. China mengekspor barang sebesar US\$ 17,19 milyar, sedangkan Indonesia mengekspor barang sebesar US\$ 14,33 milyar ke China. Nilai ekspor Indonesia ke China nilainya US\$ 49,2 milyar sementara impor dari China nilainya adalah US\$ 52 milyar.¹⁸

b. Diplomasi ekonomi China melalui sektor investasi.

Diplomasi China terhadap ASEAN dalam sektor investasi memiliki beberapa tujuan dasar : *Pertama*, ACFTA diharapkan dapat meningkatkan investasi China di ASEAN yang sebenarnya juga memiliki beberapa keuntungan komparatif bagi China seperti sumber daya alam, energi serta upah buruh yang bahkan lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh di beberapa propinsi di China. *Kedua*, sektor swasta China akan diuntungkan dengan adanya kerjasama ACFTA di bidang investasi yang memberikan kebijakan preferensial khusus sehingga mendorong mereka berinvestasi di ASEAN. *Ketiga*, China ingin menarik lebih banyak lagi investasi yang datang dari ASEAN. *Keempat*, ACFTA sebagai sebuah kerjasama perdagangan bebas diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi investasi ke China dari mitra dagang asing diluar ASEAN.¹⁹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

China menanamkan investasi terkait dengan pencarian energi di Asia Tenggara dengan cara mengerahkan SOE-SOE (*state-owned enterprises*) China yang bergerak dalam pencarian minyak seperti *China Petroleum and Chemical Company* (SINOPEC), *China National Petroleum Company* (CNPC), dan *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC). Walaupun Asia Tenggara tidak memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun pasokan minyak dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina cukup penting sehingga negara ini tidak lepas dari diplomasi China untuk eksplorasi minyak di negara-negara tersebut.

Pada tanggal 14 Maret 2005 China mengajak Filipina dan Vietnam untuk menandatangani kesepakatan untuk melakukan survei untuk mencari cadangan minyak di Laut China Selatan. Dalam bidang infrastruktur China merupakan investor terbesar di Kamboja dan China juga memberikan bantuan berupa kerjasama bilateral yang berupa bantuan skala besar untuk konstruksi infrastruktur di Vietnam, Myanmar, dan Laos. Di Kamboja, perusahaan negara China juga berinvestasi besar-besaran pada sektor infrastruktur dan kebutuhan dasar, contohnya adalah *China Road and Bridge Corporation* dan *China International Water and Electric Company*. Di Vietnam, terdapat setidaknya 50 perusahaan China yang berinvestasi di sektor pembangkit listrik, pertambangan, besi dan baja, sepeda motor, bahan kimia, dan bahkan persenjataan. Beberapa SOE China yang berinvestasi di Vietnam adalah *China Metallurgical Construction Corporation*, *China Iron and Steel*, dan *China State Construction Engineering and Harbin Power*.

China melihat bahwa penanaman modal untuk membangun infrastruktur di negara-negara ASEAN, terutama yang berbatasan langsung dengan China, akan menguntungkan dalam jangka panjang karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan perdagangan. Selain itu, China juga berniat untuk membangun infrastruktur jalan dengan rute transportasi yang menghubungkan Yunnan dan Asia Tenggara. Alasan China mendorong investasi ke ASEAN lebih karena alasan ekonomi, yakni alasan efisiensi biaya produksi. Beberapa negara anggota ASEAN menetapkan upah buruh yang bahkan lebih rendah dari China. Negara-negara

CLMV menetapkan upah buruh yang lebih rendah dibandingkan China, terutama di propinsi-propinsi China yang paling maju seperti Beijing dan Shanghai. Jika China berinvestasi di negara tetangga yang jaraknya relatif dekat dan berupah lebih rendah, maka China akan dapat memotong biaya produksi dan meningkatkan efisiensi kerja. Jarak yang relatif dekat juga menjadi nilai tambah Asia Tenggara karena akan memudahkan pergerakan barang dan jasa.²⁰

c. Tindakan persuasif China dan pengaruhnya terhadap ASEAN.

Peningkatan interaksi kerjasama China-ASEAN, juga dimanfaatkan oleh China untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mempermudah China dalam memenangkan kawasan LCS yang krusial bagi jalur perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara serta yang nantinya diperuntukkan untuk Jalur Sutra Maritim dalam kebijakan OBOR. Tentu dalam rencana ini tidak bias dicapai dengan tindakan yang sembarangan atau gegabah mengingat sengketa LCS yang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun dan sempat memanas mengancam perdamaian stabilitas keamanan di kawasan. Dalam tindakannya China memanfaatkan konstruksi sosial yang telah dibangunnya dengan ASEAN sejak 1990-an, yaitu dependensi ASEAN kepada China memudahkannya menyetir alur negosiasi demi pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Pengaruh China terhadap ASEAN sangat kentara pada Juli 2016 dalam sebuah pertemuan khusus di Kunming, China, perbedaan di antara negara anggota ASEAN sudah terlihat jelas ketika perhimpunan ini menarik kembali sebuah pernyataan keras yang mengecam China atas kedaulatan di LCS. Negara-negara yang bersekutu dengan China menolak pernyataan tersebut. Hampir seluruh dunia menyaksikan apakah para menlu ASEAN memiliki suara sama yang menghormati keputusan mahkamah arbitrase itu dan menghormati hukum internasional atau tidak. Tercatat dalam sejarah ASEAN, untuk pertama kali para menlu perhimpunan ini tidak mengeluarkan sebuah pernyataan bersama. Pasalnya sebagai ketua ASEAN tahun 2012, Kamboja menentang sebuah pernyataan bersama menteri luar negeri ASEAN mengenai LCS. Sikap yang diperlihatkan

²⁰ Ibid.

Kamboja itu mengundang pro-kontra. Yang tampak nyata ialah persatuan ASEAN telah retak akibat kecenderungan Kamboja lebih memihak kepada China. Kamboja perlu membuat keputusan-keputusan mengenai masa depannya apakah akan seiring dan seirama dengan para anggota organisasi ini, atau mengikuti tetangganya yang raksasa, sekaligus kaya, mengingat berbagai investasi yang dilakukan China.

Dalam tindakannya, rencana China untuk menguasai LCS mulai mendapatkan hasil. Kerjasama yang dibangun dengan ASEAN sejak 1990an, memperlebar ruang lingkup ekonomi-politik China. Dalam inisiatif OBOR China berhasil menarik ASEAN untuk bergabung dalam AIIB. Sepuluh anggota ASEAN telah bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* yang dipimpin Beijing, salah satu lengan keuangan OBOR, menandakan keinginan mereka untuk mengambil bagian dalam peluang ekonominya. Bergabungnya ASEAN didasari tuntutan ekonomi demi kemajuan pembangunan infrastruktur, investasi yang masuk lebih besar, dan lain sebagainya.

Melalui konsep OBOR, China menawarkan bagaimana negaranya dapat menjadi mitra dagang utama sepanjang jalur sutra bagi stabilitas politik serta kemakmuran negara berkembang. China telah berhasil meyakinkan dan menyatukan negara-negara di kawasan OBOR dan sekitarnya dalam satu institusi formal multilateral, dengan semangat untuk membangun infrastruktur negara berkembang di kawasan Asia terutama kawasan ASEAN yang potensial. AIIB benar-benar dapat menjadi sarana pengikat sebagai interkoneksi dan integrasi perkonomian. Secara tidak langsung China telah berhasil di tahap awal menancapkan konsep OBOR bagi keuntungan terkait ekspansi perdagangan bagi negaranya. Sekaligus membawa isu membangkitkan pembangunan negara-negara berkembang di kawasan yang dilalui jalur sutra dan jalur maritim.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Pengaruh Dinamika Konflik di Laut China Selatan Terhadap Strategi Politik Luar Negeri

China, kesimpulan yang didapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan serta membuktikan hipotesa yang telah dibuat yaitu :

Dinamika konflik di Laut China Selatan yang telah berlangsung sejak klaim China tahun 1947, yang telah meluas terdapatnya persaingan antara negara-negara besar di kawasan. Lalu memanasnya konflik yang terjadi diantara China, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan dan Malaysia. Yang telah direspon ASEAN dengan keberhasilannya dalam memelihara dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan selama 50 tahun terakhir. Adapun mulai terdapatnya perbedaan pendapat diantara anggota ASEAN terkait isu sensitif yaitu LCS, akan menjadi tantangan bagi ASEAN untuk memasuki 50 tahun berikutnya. Berbagai pencapaian ASEAN sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menjadikan kawasan ini sebagai potensi pasar bagi negara-negara besar khususnya China. Dinamika konflik LCS yang sebelumnya telah mengancam hubungan China-ASEAN, melahirkan upaya persuasif China untuk memulihkan hubungan diantara keduanya. China yang sebelumnya telah memulai interaksinya dengan ASEAN sejak 1990an melalui peningkatan interaksi perdagangannya dengan negara-negara Asia Tenggara menandakan komitmen dan konsistensi liberalisasi ekonomi-politik China, digunakan China sebagai alat untuk memperbesar pengaruhnya dan menghilangkan ketakutan ASEAN terhadap kekuatan ekonomi China yang besar.

Kawasan LCS sebenarnya menjadi jalur perdagangan penghubung China-ASEAN dalam inisiatif OBOR yang dikemukakan oleh Presiden Xi tahun 2013. Sadar akan persaingan yang semakin sengit oleh negara-negara besar yang mengancam lepasnya LCS, maka China menggunakan kartu ekonomi sebagai kontrol terhadap ASEAN. Upaya persuasif China dilakukan menggunakan diplomasi ekonomi di ASEAN. Tindakan-tindakan tersebut berhasil, ditandai dengan susahnyanya ASEAN dalam merumuskan COC yang mengikat, lamanya proses negosiasi kurang lebih 15 tahun sejak DOC, perubahan sikap ASEAN yang sudah tidak terlalu menentang China, serta perbedaan pendapat yang mulai terlihat diantara anggota ASEAN.

Semakin dependennya ASEAN dengan China maka semakin kuat pengaruh China. China akan dengan mudah menyingkirkan pengaruh-pengaruh barat, serta memenagkan ASEAN secara diplomatik terhadap rivalitas yang terjadi. Terkait proyek raksasa OBOR, China juga berhasil menarik ASEAN bergabung dalam AIIB guna mendanai proyek OBOR. AIIB sebagai peluang China dalam *bargaining* terhadap ASEAN, pertukaran dukungan negara-negara berkembang dengan bantuan infrastruktur yang ditawarkan China. Hal ini pula yang menjadi amunisi China jika mengalami tekanan dari negara lain di dunia internasional serta dalam menghadapi rivalitas negara-negara besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Wiranto, Surya. 2016. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut China Selatan*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio.
- Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. Penerjemah Wawan Juwanda. Bandung: Binacipta.
- Daniels, Christoper L. 2014. *South China Sea energy and Security Conflicts*. Estover Road, Plymouth PL6 7PY, UK : Scarecrow Press.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*, Edisi Kelima. Terjemahan Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Plano, Jack C. dan Olton, Roy. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin. Bandung.
- Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe. 1990 *Pengantar Hubungan internasional: Keadilan dan power*, Bandung: CV Abardin.
- Saputra, Heru. 2016. *Klaim Teritorial China di Perairan Laut China Selatan dan Respon Filipina (Analisa Strategi Filipina Sebagai Respon atas Klaim China di Laut China Selatan*. Skripsi Program S1. Bandung : FISIP-HI Unpas.
- A.Irawan, J.H. dan Kartasasmita, Giandi. 2015. *Diplomasi komersial IndonesiAKE Belanda Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)*. Penelitian Monodisipliner : IPPM, UNPAR.

- Radiah. 2017. *Pengaruh Dinamika Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Skripsi Program S1. Bandung: FISIP-HI Unpas.
- Harahap, Anugrah, Baginda. 2016. *Upaya ASEAN dalam Menyelesaikan Konflik Laut China Selatan Tahun 2010-2015*. Pekanbaru: FISIP-HI Universitas Riau.
- Utoro, Romavitanto, Hermudani. 2010. *Pencapaian China-ASEAN Free Trade Area Studi Kasus Early Harvest Program*. Skripsi tidak diterbitkan. Depok: FISIP-HI UI.
- Harini, Setyasih. *Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan*. *Jurnal Staf Pengajar Ilmu Hubungan Internasional*. Surakarta: FISIP-HI Unsri.
- Baswedan, Laila, Rezvina. 2015. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara Sikap ASEAN dalam Usaha Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan*. Makalah tidak di terbitkan. Yogyakarta: FISIP-HI Universitas Muhammadiyah.
- Ayuningtyas, Elisa, Putri. 2015. *Kepentingan Cina "One Belt One Road" Melalui AIIB (ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK)*. Makalah tidak diterbitkan. Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Syaifullah, Imron. 2016. *Diplomasi Republik Rakyat China di ASEAN Pada Masa Xi Jinping*. Jurnal tidak diterbitkan. Surakarta: FISIP-HI Universitas Sebelas Maret.